

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 18 A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Basis otonomi daerah adalah daerah kabupaten dan daerah kota yang didasarkan asas desentralisasi. Sedangkan daerah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan administratif yang mencakup lintas kabupaten

dan kota. Desentralisasi pada dasarnya pelimpahan atau peyerahan kekuasaan atau wewenang dibidang tertentu secara vertikal.

Dengan diberlakukanya otonomi daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembagian urusan pemerintah juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan.

Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal maka diberlakukan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Dengan Desentralisasi fiscal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga Pemerintah Daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah seperti diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 6. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli daerah atau PAD adalah (Pendapatan Asli

daerah yang bersumber dari pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi PAD diantaranya Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Inflasi.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan asli daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Gde Bhaskara dan A.A Bagus, 2014).

Kabupaten Kupang merupakan daerah otonom yang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pemerintah Kabupaten Kupang diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga dapat mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Besar kecilnya penerimaan Pendapatan asli daerah seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah (yang merupakan komponen penyumbang Pendapatan asli daerah terbesar) sehingga mampu membiayai belanja pemerintah daerah (Kuncoro dalam Savitry,2011). Pajak dan retribusi dipungut dari masyarakat untuk Negara.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi**  
**PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Kupang**  
**Tahun 2014-2021**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
	<b>Harga Berlaku</b>	
<b>2014</b>	Rp 377,824,374	301.318 Jiwa
<b>2015</b>	Rp 396,893,907	348.001 Jiwa
<b>2016</b>	Rp 415,966,585	360.228 Jiwa
<b>2017</b>	Rp 483,161,388	372.777 Jiwa
<b>2018</b>	Rp 459,581,608	387.479 Jiwa
<b>2019</b>	Rp 483,161,388	403.582 Jiwa
<b>2020</b>	Rp 477,626,400	366.383 Jiwa
<b>2021</b>	Rp 481,851,200	334.189 Jiwa

Sumber : [www.NTT.Bps.go.id](http://www.NTT.Bps.go.id)

Dari tabel 1.1 secara umum dapat dilihat bahwa total , PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pengeluaran dengan harga Konstan dari tahun ke tahun, dan jumlah penduduk Kabupaten Kupang mengalami fluktuasi (naik turun). Pada Tahun 2014 total PDRB Harga Konstan Rp 377,824,374 dan total jumlah jumlah penduduk sebanyak 301.318 Jiwa. Pada Tahun 2015 total PDRB dengan harga Konstan meningkat sebesar Rp 396,893,907 dan total jumlah penduduk sebanyak 348.001 Jiwa. Pada tahun 2016 total PDRB dengan harga Konstan sebesar Rp 415,966,585 dan total jumlah penduduk sebanyak 360.228 jiwa. Pada tahun 2017 total PDRB dengan harga Konstan

sebesar Rp 483,161,388 dan juga total jumlah penduduk sebanyak 372.777 jiwa. Dan pada tahun 2018 total PDRB dengan harga Konstan sebesar Rp 459,581,608 dan total jumlah penduduk mengalami kenaikan sebanyak 387.479 Jiwa. Dan pada tahun 2019 total PDRB dengan harga Konstan menurun sebesar Rp 483,161,388 dan total jumlah penduduk sebanyak 403.582 Jiwa. Dan pada tahun 2020 total PDRB dengan harga konstan sebesar Rp 477,626,400 dan total jumlah penduduk sebanyak 336.883 Jiwa. Dan pada tahun 2021 total PDRB dengan harga Konstan meningkat sebesar Rp 481,851,200 dan total jumlah penduduk sebanyak 334.189 Jiwa.

Berikut data realisasi penerimaan PAD Kabupaten Kupang:

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Kupang**  
**Tahun Anggaran 2014-2021 (Rp)**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan</b>	<b>Lain-lain PAD Yang sah</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2014</b>	<b>11.212.100.090</b>	<b>6.312.900.190</b>	<b>12.825.000.310</b>	<b>20.150.000.589</b>	<b>50.500,001,179</b>
<b>2015</b>	<b>12.632.465.920</b>	<b>8.827.745.102</b>	<b>22.885.186.838</b>	<b>22.917.163.787</b>	<b>67.262.561.647</b>
<b>2016</b>	<b>14.547.761.178</b>	<b>9.401.430.379</b>	<b>21.346.010.143</b>	<b>27.919.529.852</b>	<b>73.214.731.552</b>
<b>2017</b>	<b>18.846.718.341</b>	<b>5.797.929.674</b>	<b>15.728.041.344</b>	<b>78.725.371.276</b>	<b>119.098.060.635</b>
<b>2018</b>	<b>15.639.947.591</b>	<b>6.806.148.825</b>	<b>15.579.962.678</b>	<b>28.156.936.300</b>	<b>66.182.995.394</b>
<b>2019</b>	<b>14.337.976.457</b>	<b>6.587.052.520</b>	<b>15.542.552.638</b>	<b>15.629.464.935</b>	<b>52.097.046.550</b>
<b>2020</b>	<b>19.510.398.197</b>	<b>6.376.283.956</b>	<b>14.937.486.319</b>	<b>10.679.256.729</b>	<b>51.503.425.201</b>
<b>2021</b>	<b>16.820.598.982</b>	<b>10.510.198.922</b>	<b>17.311.199.980</b>	<b>25.371.966.221</b>	<b>70.013.964.105</b>

*Sumber : Badan pendapatan daerah Kabupaten Kupang.*

Berdasarkan data pada Tabel. 1.2, secara angka dapat dilihat bahwa Pendapatan asli daerah Delapan tahun terakhir bersifat fluktuasi atau naik turun dimana pada tahun 2014 nilai PAD sebesar Rp. 50,500,001,179 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar Rp. 67.262.561.647 dan pada tahun 2016 nilai PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 73.214.731.552, pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 119.098.060.635 sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 66.182.995.394 dan pada tahun 2019 nilai PAD sebesar Rp. 52.097.046.550 Dan pada Tahun 2020 nilai PAD terjadi penurunan lagi Sebesar Rp. 51.503.425.201 yang disebabkan karena adanya dampak pandemi COVID-19 Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 70.013.964.105. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan pendapatan asli daerah.

Adanya PAD tentu dipengaruhi beberapa faktor yaitu pendapatan asli daerah dipengaruhi Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Inflasi. Hasil penelitian Sari, (2013), jumlah penduduk dan PDRB pengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan penelitian Arief Eka, (2011), jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang di atas maka maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2021”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
2. Apakah Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah PDRB dan Jumlah penduduk berpengaruh secara simultan pada Penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Kupang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah, pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis dan memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi secara teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang ingin melakukan atau lebih lanjut mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, serta sebagai penambahan sumber pustaka yang telah ada



## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

- 1) Penelitian ini berguna sebagai sarana belajar yang besyarat akan nilai positif dan sangat membantu penulis dalam meningkatkan kualitas pengetahuan penulis.
- 2) Penelitian ini berguna sebagai pengalaman penulis berkaitan dengan kondisi social yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan langsung dengan bidang keuangan ataupun akuntansi sektor publik.

### b. Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan dan gambaran kepada pemerintah kota kupang dalam menentukan arah dan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah.

### c. Bagi masyarakat

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai tingkat penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten kupang.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bentuk transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dikelola baik oleh pemerintah kota ataupun SKPD.

### d. Bagi penulis selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk studi-studi selanjutnya dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara spesifikasi dan lebih mendalam.